

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	18
A. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Tinjauan Umum tentang Praperadilan.....	18
a. Wewenang Praperadilan	18
b. Fungsi Praperadilan	20
c. Pemohon Praperadilan.....	21
d. Isi Putusan Praperadilan	25
e. Upaya Hukum Putusan Praperadilan.....	26
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Khusus di Bidang Perpajakan ...	28

a. Pengertian Tindak Pidana Khusus	28
b. Pengertian Tindak Pidana Khusus di Bidang Perpajakan.....	30
3. Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	32
a. Pengertian Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	32
b. Pengaturan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam Peraturan Perundang-Undangan	33
4. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang	34
a. Jenis dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi	34
b. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	37
c. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	39
d. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	40
5. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum	41
6. Tinjauan Umum tentang Asas Legalitas.....	43
B. Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Bahan Penelitian	49
C. Cara Pengumpulan Data	52
D. Analisis Hasil Penelitian.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Analisis Kedudukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam Ruang Lingkup Praperadilan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	54

1. Ruang Lingkup Praperadilan dan Eksklusi Awal Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	54
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 dan Upaya Paksa	57
3. Interpretasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	60
4. Kewenangan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Konteks Upaya Paksa..	66
5. Pemeriksaan Bukti Permulaan Bukan Sebagai Objek Praperadilan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023.....	74
6. Kewenangan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Perspektif Perbandingan dengan Pemeriksaan Pajak.....	77
7. Catatan Kritis terhadap Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	84
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Praperadilan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	86
1. Tinjauan Praktik Putusan Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	86
2. Analisis Putusan Praperadilan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	88
C. Analisis Praktik Putusan Praperadilan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Kepastian Hukum.....	297
1. Divergensi Praktik Putusan Praperadilan sebagai Manifestasi Ketidakpastian Hukum.....	298
2. Signifikansi Divergensi Penafsiran terhadap Penegakan Hukum dan Hak Wajib Pajak	302

3. Implikasi Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap Kepastian Hukum.....	306
4. Konsistensi Putusan Praperadilan dan Perlindungan dari Kesewenang-wenangan	307
5. Implikasi Yuridis Tindakan Sewenang-Wenang dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Upaya Hukum bagi Wajib Pajak	308
6. Penegasan atas Implikasi terhadap Kepastian Hukum dari Praktik Putusan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	315
BAB V PENUTUP	320
A. Kesimpulan	320
B. Saran	323
DAFTAR PUSTAKA.....	327

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Wewenang Peminjaman Dokumen dan Memasuki Ruangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Penyitaan dan Penggeledahan dalam Penyidikan.....	70
Tabel 2 Perbandingan Kewenangan Pemeriksa Bukti Permulaan (PBP) dan Pemeriksa Pajak (PP) terkait meminjam dokumen, memasuki ruangan, dan penyegelan.	78
Tabel 3 Perbandingan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Praperadilan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023.	294